

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN SEMARANG**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

DAVID REANO PRATAMA

Nim : 31402000320

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN SEMARANG**

Disusun Oleh:

DAVID REANO PRATAMA

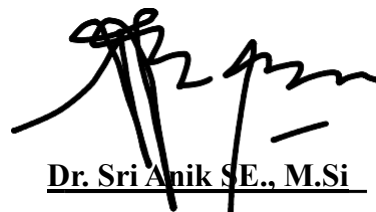
NIM: 31402000320

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 28 Juni 2024

Pembimbing



Dr. Sri Anik SE., M.Si

NIK: 210493033

**“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN SEMARANG”**

Disusun Oleh:

David Reano Pratama

Nim: 31402000320

Telah dipertahankan didepan penguji Pada tanggal 25 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

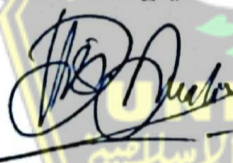
Dosen Pembimbing



Dr. Sri Anik SE., M.Si

NIK: 210493033

Dosen Penguji 1



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si, Akt., CA

NIK: 211406020

Dosen Penguji 2



Sri Sulistyowati, SE., M.Si

NIK: 211403017

Digitally signed

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 25 Juli 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si, AK., CA, IFP., AWP.

NIK: 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : David Reano Pratama

Nim : 31402000320

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil dari plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas hal tersebut.

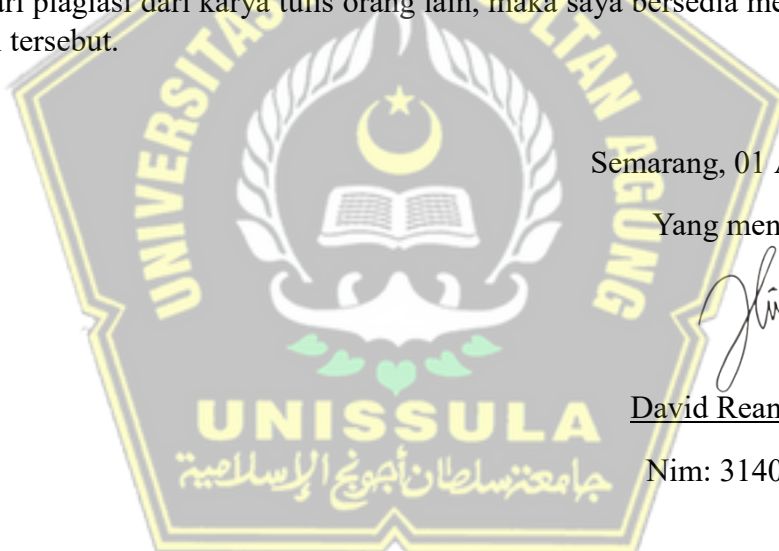
Semarang, 01 Agustus 2024

Yang menyatakan,



David Reano Pratama

Nim: 31402000320



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive sampling*. Didapatkan 68 sampel dari SKPD di Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan adalah teori keagenan (*agency theory*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linier berganda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji *goodness of fit* dan uji hipotesis. Alat analisis data yang digunakan yaitu SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang.

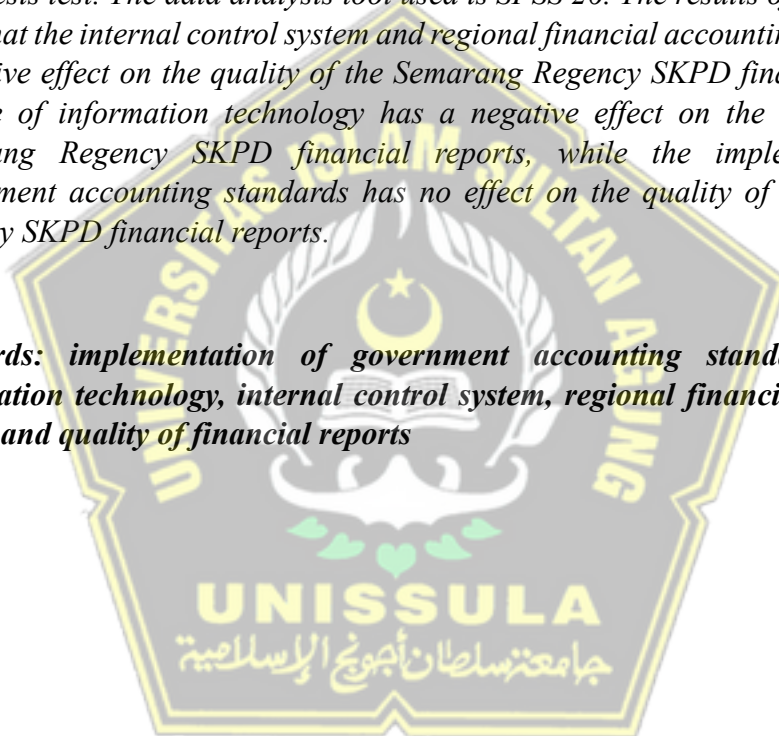
Kata Kunci : penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan



ABSTRACT

This research aims to analyze and test the effect of implementing government accounting standards, use of information technology, internal control systems and regional financial accounting systems on the quality of Semarang Regency SKPD financial reports. The population used in this research is. The sampling method uses the purposive sampling method. 68 samples were obtained from SKPD in Semarang Regency. The theory used is agency theory. This research uses a quantitative approach with a multiple linear regression model. The data analysis techniques used in this research are descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, goodness of fit test and hypothesis test. The data analysis tool used is SPSS 26. The results of this research show that the internal control system and regional financial accounting system have a positive effect on the quality of the Semarang Regency SKPD financial reports, the use of information technology has a negative effect on the quality of the Semarang Regency SKPD financial reports, while the implementation of government accounting standards has no effect on the quality of the Semarang Regency SKPD financial reports.

Keywords: *implementation of government accounting standards, use of information technology, internal control system, regional financial accounting system and quality of financial reports*



INTISARI

Penelitian ini mengungkap tentang permasalahan bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yaitu sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar.

Penelitian ini menggunakan data primer. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*. Didapatkan 68 sampel dari SKPD di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pengujian teknik analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 dapat disimpulkan bahwa variable sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pra-skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang”. Penyusunan pra-skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa secara tidak langsung penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan pra-skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, PhD., Ak., Ca., IFP., AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Sri Anik SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan proposal skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan moral yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi penulis.

5. Ayah, Ibu, Adik, dan keluarga tercinta atas kasih sayang, seluruh cinta, doa yang tiada henti, serta dukungan moril dan materil.
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi saya semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan baik.
7. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan pra-skripsi masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Penulis berharap semoga pra-skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.5.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 <i>Grand Theory (Agency Theory)</i>	10
2.2 Variabel Penelitian.....	11
2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan.....	11
2.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	14
2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	16
2.2.4 Sistem Pengendalian Intern.....	17
2.2.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	21
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	26
2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD.....	26
2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD.....	27
2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD.....	28
2.4.4 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD.....	30

2.5	Kerangka Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Populasi dan Sampel	32
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5	Definisi Operasional Variabel	34
3.5.1	Variabel Independen.....	34
3.5.1.1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	34
3.5.1.2	Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	34
3.5.1.3	Sistem Pengendalian Intern	35
3.5.1.4	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	35
3.5.2	Variabel Dependen	36
3.5.2.1	Kualitas Laporan Keuangan	36
3.5.3	Skala Pengukuran	37
3.6	Metode Analisis Data	39
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	39
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	39
3.6.2.1	Uji Validitas	39
3.6.2.2	Uji Reliabilitas.....	39
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	40
3.6.3.1	Uji Normalitas	40
3.6.3.2	Uji Multikolinearitas	41
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas	41
3.6.4	Analisis Regresi Linier Berganda	41
3.6.5	Uji Goodness of Fit (Uji Kelayakan Model).....	42
3.6.5.1	Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	42
3.6.5.2	Uji Koefisiensi Determinasi (R Square).....	42
3.6.6	Uji Hipotesis	43
3.6.6.1	Uji t.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Deskripsi Sampel	44
4.2	Deskripsi Identitas Responden.....	45
4.3	Deskripsi Variabel Penelitian	47

4.3.1	Deskripsi Tanggapan Responden	48
4.4	Analisis Data	56
4.4.1	Hasil Uji Kualitas Data	56
4.4.1.1	Hasil Uji Validitas	56
4.4.1.2	Hasil Uji Reliabilitas	59
4.4.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	60
4.4.2.1	Hasil Uji Normalitas	60
4.4.2.2	Hasil Uji Multikolinieritas	61
4.4.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
4.4.3	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	63
4.4.4	Hasil Uji Goodness of Fit (Uji Kelayakan Model)	65
4.4.4.1	Hasil Signifikan Simultan (Uji F)	65
4.4.4.2	Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R Square)	66
4.4.5	Hasil Uji Hipotesis	67
4.4.5.1	Hasil Uji t	67
4.5	Pembahasan	68
4.5.1	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang	68
4.5.2	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang	70
4.5.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang	71
4.5.4	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang	72
BAB V	PENUTUP	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Keterbatasan Penelitian	75
5.3	Saran	75
5.4	Implikasi Penelitian	76
DAFTAR	PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia saat ini adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi apakah telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan melalui media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik (Akhmad dkk., 2018).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bentuk upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi,

sosial, maupun politik. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yang diantaranya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Rahmawati dkk., 2018). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. menilai kondisi keuangan. mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang akan diberikan BPK dalam pelaporan keuanagn yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Opini (TMP). Opini tersebut mencerminkan kualitas suatu laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. berjalannya fungsi pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Hasanah & Siregar, 2021). Laporan keuangan yang berkualitas akan mendapatkan opini WTP dari BPK.

Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

2010 (SAP 2019) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu diantaranya penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu belum memberikan hasil yang konsisten terkait dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018) dan Hasanah & Siregar (2021). Menurut Rahmawati dkk (2018) yang memberikan kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut Hasanah & Siregar (2021) memberikan kesimpulan bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain penerapan standar akuntansi pemerintah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah teknologi informasi. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dijelaskan bahwasannya dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan sistem informasi keuangan sejalan dengan prinsip dasar tata aturan yang baik, dalam rangka meningkatkan kemampuan instansi dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi untuk memanfaatkan kemajuan bidang teknologi yang sudah terkomputerisasi dan serba cepat. Tentunya dengan teknologi dan informasi akan mampu membantu pegawai dalam menemukan adanya temuan-temuan yang menyimpang.

Berikut hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang menunjukkan adanya persamaan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018) dan Ismail dkk (2021). Menurut Rahmawati dkk (2018) memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sejalan dengan Ismail dkk (2021) yang memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian sistem pengendalian

intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Beberapa penelitian terdahulu belum memberikan hasil yang konsisten terkait dengan variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan yang menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta dkk (2017), Rahmawati dkk (2018), Hasanah & Siregar (2021) dan Ismail dkk (2021). Menurut Mokoginta dkk (2017) yang memberikan kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut Rahmawati dkk (2018) dan Ismail dkk (2021) memberikan kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan terakhir menurut Hasanah dkk (2021) memberikan kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan

daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Berikut hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang menunjukkan adanya persamaan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta dkk (2017), Defitri (2018), dan Ismail dkk (2021). Menurut Mokoginta dkk (2017) memberikan kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sejalan dengan Defitri (2018) dan Ismail dkk (2021) yang memberikan kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelum-sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Semarang. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmawati dkk (2018) yang juga menyarankan untuk peneliti berikutnya melakukan penelitian lebih mendalam dengan menambah variable-variabel baru untuk menguji kualitas laporan keuangan. Adapun perbedaan **pertama** penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang mengacu pada penelitian Rahmawati dkk (2018) adalah menambahkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sebagai variabel independen, adapun tujuan penambahan variabel tersebut karena SAKD dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas lembaga publik dalam menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Kedua objek penelitian yaitu SKPD Kabupaten Semarang, karena SKPD Kabupaten Semarang masih mempunyai permasalahan aset yang belum dapat dituntaskan. Sedangkan transparansi dalam laporan keuangan itu sangat penting, jika laporan keuangan daerah tidak cukup transparan dalam menggambarkan informasi mengenai aset, pihak yang berkepentingan mungkin kesulitan memahami dan memonitor aset secara efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dikemukakan diatas maka ditemukan nilai permasalahan, adanya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Maka dari itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang?
4. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat di bidang akuntansi sektor publik dalam mengembangkan penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para staff sub bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory (Agency Theory)*

Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan “*nexus of contract*”. Agen berperan sebagai pihak yang diberikan kontrak oleh *principal* untuk bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Teori keagenan dapat diartikan dimana adanya suatu hubungan diantara dua pihak yaitu *principal* dan agen yang diperintah untuk suatu pekerjaan atau jasa dalam suatu kontrak yang mengatasnamakan *principal* dan memberikan kebebasan penuh untuk agen dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen, sehingga agen tidak selamanya mengikuti keinginan *principal*. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hubungan tersebut dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*). Untuk mengurangi masalah tersebut menimbulkan biaya yang akan ditanggung oleh *principal* atau agen yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*.

Praktik pelaporan keuangan di organisasi sektor publik mempunyai keterkaitan dengan adanya *agency theory* dalam penelitian ini, yang dimana pemerintah disini

bertindak sebagai agen maka harus memberikan informasi laporan keuangan yang berguna untuk para pemakai informasi (*principal*) sebagai bentuk tanggungjawab dalam menilai akuntabilitas, dan mampu membuat keputusan dalam kebijakan ekonomi, politik, maupun sosial baik terlibat secara langsung ataupun tidak langsung melalui para wakil-wakilnya. Dalam hal ini, SKPD yang bertindak sebagai agen harus memberikan informasi laporan keuangan yang berguna untuk para pemakai informasi keuangan yaitu masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung melalui DPRD untuk menilai akuntabilitas dan mampu membuat sebuah keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (SAP 2019), menjelaskan karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan-laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, karakteristik sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak beda jauh.

3. Netralitas

Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang

lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah”. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa: “Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan keuangan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP terdiri dari PSAP Nomor 1 sampai dengan Nomor 11.

PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan, No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), No. 3 tentang Laporan Arus Kas, No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), No. 5 tentang akuntansi persediaan, No. 6 tentang akuntansi investasi, No. 7 tentang akuntansi aset tetap, No. 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, No. 9 tentang akuntansi kewajiban, No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, dan No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi (Pasal 4 PP 71 Tahun 2010).

SAP merupakan dasar pencatatan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang tidak dibuat atau disusun berdasarkan SAP hasil dari laporan keuangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SAP, maka pencatatan laporan keuangan akan menjadi transparan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) diyakini dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut PP No. 71 seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara.

2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar dapat disebar dan diakses secara global (Riandani, 2017).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis saja, tetapi dimanfaatkan juga pada organisasi sektor publik, yang termasuk didalamnya adalah organisasi pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi yang mendukung tujuan efisiensi dan efektif tidak menjadi sia-sia jika dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya teknologi informasi, pemerintah mendapatkan banyak manfaat dari pengintegrasian pengelolaan keuangan dengan teknologi informasi. Sebagai contoh mampu menyederhanakan kegiatan yang kompleks dan lebih menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, tepat waktu, relevan, mudah dipahami, lengkap, sudah lolos uji konteks perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

2.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI terdiri dari lima unsur antara lain; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam SPI tersebut menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Ardianto & Eforis, 2019).

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfer atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Penilaian risiko merupakan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Aktivitas pengendalian (*Control activities*)

Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen yang dilakukan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan

untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional yang terdapat di dalam organisasi tersebut.

5. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern.

Jadi, pengendalian intern dapat dikatakan sebagai suatu proses yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern bermaksud untuk memberikan keyakinan atas pencapaiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala

aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Husna, 2022).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Objek Penelitian dan Tahun Pengamatan	Variabel Penelitian, Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Novtania mokoginta, linda lambey, winston pontoh (2017), Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan	Objek penelitian: BPKAD Bolaang Mongondow Utara Tahun Pengamatan 2017	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan (y) • Sistem pengendalian intern (x) • Sistem akuntansi keuangan daerah (x) 	Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

	keuangan pemerintah		Alat analisis SPSS	kualitas laporan keuangan
2	Rama Ardianto, Chermian Eforis (2018), pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, Pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber Daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah Terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah	Objek penelitian: SKPD Tangerang Tahun pengamatan 2018	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan (y) • Penerapan SAP (x) • Pemanfaatan teknologi informasi (x) • Kompetensi SDM (x) • Sistem pengendalian intern (x) • Sistem akuntansi keuangan daerah (x) Alat analisis SPSS	penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3	Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, Lilik Handaya Eka (2018), Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan skpd kota tangerang selatan	Objek penelitian: SKPD Tangerang Selatan Tahun pengamatan 2011-2015	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan (y) • Penerapan standar akuntansi pemerintah (x) • Pemanfaatan teknologi informasi (x) • Sistem pengendalian intern (x) Alat analisis SPSS	Penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

4	Siska yulia defitri (2018), Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Objek penelitian: Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun pengamatan 2018	Variabel: • Kualitas laporan keuangan (y) • Pengelolaan keuangan daerah (x) • Sistem akuntansi keuangan daerah (x) Alat analisis SPSS	Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5	Euis Mardiyatul Fauziah (2019), Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi	Objek penelitian: OPD Kota Serang Tahun pengamatan 2013-2017	Variabel: • Kualitas laporan keuangan (y) • Penerapan SAP (x) • Kopetensi aparatur pemerintah (x) • Pemanfaatan teknologi informasi (x) Alat analisis SPSS	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang, Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang
6	Gusrya Indria Sari, Fadli (2019), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi	Objek penelitian: SKPD Kota Banda Aceh	Variabel: • Kualitas laporan keuanagn (y)	Penerapan <i>good governance</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

	kualitas laporan keuangan daerah	Tahun pengamatan 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan good governance (x) • Penerapan standar akuntansi pemerintah (x) • Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (x) <p>Alat analisis SmartPLS 1.0 M3 program</p>	daerah, Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
7	Abdul rahman, ayudhini azzahra permatasari (2021), Pengaruh kompetensi sdm dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Objek penelitian: SKPD Kabupaten Buleleng Tahun pengamatan 2021	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan (y) • Kopetensi SDM (x) • Sistem akuntansi keuangan daerah (x) <p>Alat analisis SPSS</p>	kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
8	Siti Hasanah, Tapi Rumondang Sari Siregar (2021), Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas	Objek penelitian: OPD di Labuhanbatu Tahun pengamatan 2015-2018	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan (y) • Penerapan standar akuntansi pemerintah (x) • Sistem informasi akuntansi (x) 	Penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya

	laporan keuangan opd di kabupaten labuhanbatu		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian intern (x) • Kompetensi sumber daya manusia (x) <p>Alat analisis SPSS</p>	manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
9	Nuraini Ismail, Apriana Marselina, Elsensiana Bupu Loda (2021), Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pengendalian internal, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten nagekeo	Objek penelitian: Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun pengamatan 2021	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan (y) • Sistem akuntansi keuangan daerah (x) • Sistem pengendalian intern (x) • Pemanfaatan teknologi informasi (x) <p>Alat analisis SPSS</p>	Sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern, dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan
10	Ade Husna, Maryam, Samsul Ikhbar (2022), Pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat Daerah kabupaten aceh besar	Objek penelitian: SKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun pengamatan 2022	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas laporan keuangan (y) • Kompetensi pengelolaan keuangan (x) • Sistem akuntansi keuangan daerah (x) <p>Alat analisis SPSS</p>	Kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Besar

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama pemakai laporan. Untuk mencapai itu semua, standar akuntansi pemerintahan menetapkan menegaskan keseluruhan pertimbangan dalam rangka menyajikan LKPD, Sistem akuntansi pemerintahan yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Hubungan agensi muncul ketika *principal* memberikan wewenang kepada agen, sehingga agen wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan kepada *principal*. Hubungan agensi dapat menimbulkan masalah ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*) karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan dan posisi operasi entitas yang sebenarnya dibanding *principal*.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat mengurangi kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan SAP. Dengan demikian dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baik maka dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi berkualitas.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia.

Teori agensi merupakan hubungan antara *principal* yang memberikan wewenang kepada agen. Agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan kepada *principal*. Hubungan antar *principal* dengan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*) karena agen memiliki banyak informasi mengenai posisi keuangan dan posisi entitas yang sebenarnya dibandingkan *principal*.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik maka dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi berkualitas dan akan membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan proses penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan juga tepat sehingga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Rahmawati dkk (2018) dan Ismail dkk (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2011). Proses pengendalian internal yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi akan

menimbulkan semangat organisasi untuk terus melakukan upaya dalam menjaga kualitas laporan keuangan organisasi.

Hubungan keagenan dapat terjadi ketika agen menerima wewenang dari *principal* untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga agen bertanggungjawab kepada *principal* atas tugas tersebut. Hubungan tersebut dapat menimbulkan masalah ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*) karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan dan posisi operasi entitas yang sebenarnya dibandingkan *principal*.

Sistem Pengendalian Intern dirancang memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pengendalian intern akan mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan mencegah inkonsistensi. Dengan demikian, dengan melakukan pengendalian intern yang baik maka dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi berkualitas dan akan dapat membantu menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018), dan Ismail dkk (2021) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang

2.4.4 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut (Rahman, 2021).

Teori agensi adalah hubungan antara *principal* dan agen yang di mana *principal* memberikan wewenang kepada agen. Sehingga agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan kepada *principal*. Hubungan antar *principal* dengan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetry information*) karena agen memiliki banyak informasi mengenai posisi keuangan dan posisi entitas yang sebenarnya dibandingkan *principal*.

Sistem akuntansi keuangan daerah erat kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada periode tertentu untuk mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Dengan demikian, dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga laporan

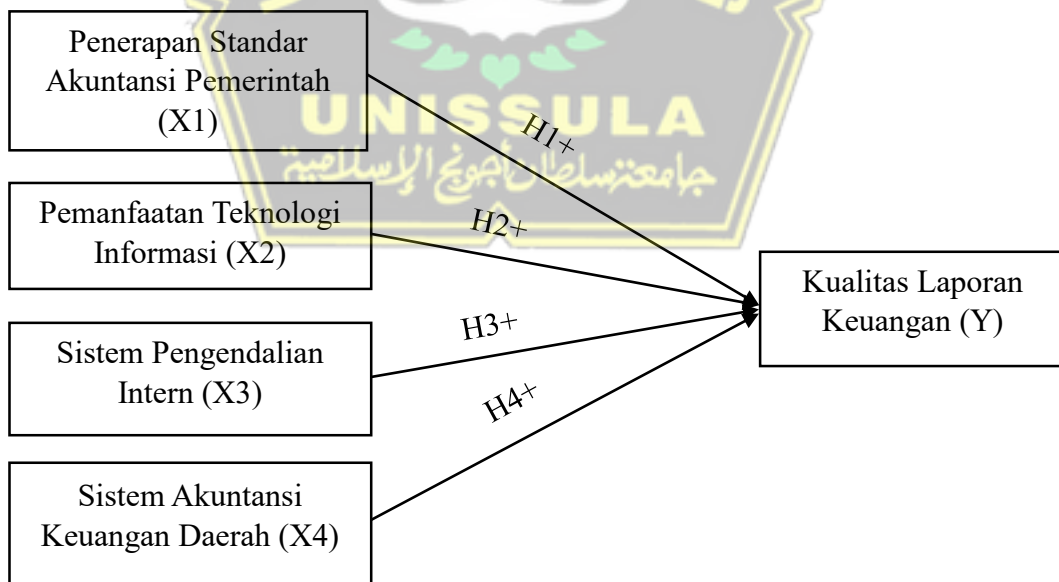
keuangan yang dihasilkan menjadi berkualitas dan akan menghasilkan laporan keuangan jadi lebih baik dan berkualitas.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta dkk (2017), Defitri (2018), dan Ismail dkk (2021) membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang

2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah), terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan).



Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*. Penelitian *explanatory research* adalah sebuah penelitian yang dapat menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah sejumlah 46 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Semarang.

Menurut Sugiyono (2017), Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau sumber data

dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel yaitu:

1. Kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di SKPD Kabupaten Semarang
2. Dengan memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipilih pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung. Cara yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dijawab oleh responden yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di SKPD Kabupaten Semarang yang menjadi sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (Kuesioner) yang kemudian akan diisi oleh responden yang merupakan kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di SKPD Kabupaten Semarang. Dengan metode ini responden diminta untuk memberikan jawaban jujur dengan merespon setuju atau tidak setuju terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini adalah “penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah”.

3.5.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Ningtyas & Widyawati (2015), penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian Rahmawati dkk (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator pengukuran penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu:

1. Pengakuan
2. Pencatatan
3. Pengukuran

3.5.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Fauziyah (2019), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Berdasarkan penelitian Rahmawati dkk (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator pengukuran pemanfaatan teknologi informasi yaitu:

1. Efisiensi dan efektivitas
2. Jaringan internet
3. Keahlian pemakai

3.5.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Yuliani & Agustini (2021), sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian. Berdasarkan penelitian Rahmawati dkk (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator pengukuran sistem pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

3.5.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Husna (2022), sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Berdasarkan penelitian Defitri (2018)

mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator pengukuran sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

1. Pencatatan
2. Penggolangan dan pengikhtisaran
3. Pelaporan

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang sering disebut dengan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya variabel independen atau variabel bebas. Besar kecilnya perubahan yang terjadi pada variabel dependen tergantung dari besar kecilnya variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan.

3.5.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Sari & Fadli (2019), Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator pengukuran kualitas laporan keuangan yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

3.5.3 Skala Pengukuran

Untuk mengukur instrumen dalam variabel penelitian ini, digunakan skala Likert dengan skala interval 5 skala. Lima skala likert tersebut sebagai berikut:

Kategori “**Sangat Tidak Setuju (STS)**” memiliki skor 1

Kategori “**Tidak Setuju (TS)**” memiliki skor 2

Kategori “**Netral (N)**” memiliki skor 3

Kategori “**Setuju (S)**” memiliki skor 4

Kategori “**Sangat Setuju (SS)**” memiliki skor 5

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Konsep	Pengukuran	Sumber
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.	1. Pengakuan 2. Pencatatan 3. Pengukuran	(Rahmawati dkk., 2018) (Ningtyas & Widyawati, 2015)
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, <i>database</i> , jaringan, <i>electronic commerce</i> , dan jenis lainnya yang	1. Efisiensi dan efektivitas 2. Frekuensi pemanfaatan 3. Keahlian pemakai	(Rahmawati dkk., 2018) (Fauziyah, 2019)

		berhubungan dengan teknologi.		
3	Sistem Pengendalian Intern	Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan 	(Rahmawati dkk., 2018) (Yuliani & Agustini, 2021)
4	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	SAKD merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan 2. Penggolongan dan pengikhtisaran 3. Pelaporan 	(Defitri, 2018) (Husna, 2022)
5	Kualitas Laporan Keuangan	Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami 	(PP No 71 Tahun 2010) (Sari & Fadli, 2019)

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimanfaatkan untuk menganalisa sebuah data dengan metode memberikan gambaran atau memperoleh deskripsi mengenai data berdasarkan nilai rata-rata (mean), varian, standar deviasi, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2021).

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan dalam penilaian sah maupun tingkat kevalidan kuesioner. Dikatakan valid bila pertanyaan dapat mengukur variabel penelitian. Validitas juga dapat didefinisikan sebagai ukuran yang memperlihatkan tingkat ketepatan instrumen. Tingginya nilai validitas menandakan jika instrumen tersebut sudah tepat untuk mengukur variabel. Deteksi uji validitas ini menggunakan nilai r hitung yang dibandingkan dengan nilai r tabel pada df (*degree of freedom*) = $n-2$, di mana n adalah jumlah sampel. Bila r hitung di atas r tabel maka indikator tersebut dapat dikatakan valid. (Ghozali, 2021).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dipergunakan untuk pengukuran kehandalan indikator dalam kuesioner yang membentuk suatu konstruk (variabel). Kehandalan dapat dilihat dari jawaban yang relatif konsisten antar waktu. Untuk mengukur reliabilitas dapat dilakukan melalui cara berikut: 1. Pengukuran berulang (*Repeated Measures*) yaitu pemberian pertanyaan yang serupa diwaktu yang berbeda untuk dilihat

kekonsistenan jawaban responden tersebut. 2. Pengukuran sekali saja (*One Shot*) yaitu pengukuran dengan pertanyaan yang berbeda untuk dikorelasikan dengan jawaban pertanyaan lain. Deteksinya menggunakan *Alpha Cronbach* (α) dengan kriteria, bila *Alpha Cronbach* di atas 0,60 maka item-item pada variabel tersebut diandalkan/reliabel (Ghozali, 2021).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Layak tidaknya data penelitian diuji dengan asumsi klasik (Ghozali, 2021). Hasil pengujian haruslah menjadi persamaan terbaik di mana residual data berdistribusi normal, tidak mengandung multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Jika segala asumsi terpenuhi dalam regresi maka dapat diperkirakan hasil yang didapatkan akan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Untuk lebih memahaminya, dapat dijelaskan melalui penjelasan berikut:

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji ini berfungsi dalam melihat kenormalan residual yang didasarkan pada uji t dengan asumsi distribusi normal harus terpenuhi. Bila terjadi pelanggaran asumsi ini menjadikan tidak validnya model yang dihasilkan khususnya untuk sampel yang kecil. Deteksinya dilakukan dengan analisis grafik (histogram dan garis normal) dan uji statistik *kolmogorov smirnov*. Residual berdistribusi normal apa bila membentuk lonceng sempurna atau data berimpit dengan garis normal atau memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 (Ghozali, 2021).

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini berfungsi dalam melihat eksistensi (keberadaan) antar variabel independen yang berkorelasi. Deteksinya dilakukan dengan nilai *tolerance* dan VIF di setiap *Independent variable*, bila *tolerance* bernilai di atas 0,1 atau VIF bernilai di bawah 10, maka gejala multikolinearitas tidak terjadi pada model. (Ghozali, 2021).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berfungsi dalam untuk melihat varian residual yang tidak sama antar data penelitian. Deteksinya melalui *scatterplot* dan uji Glejser. Kriteria uji yang digunakan yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas bila *scatterplot* menghasilkan pola acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan nilai signifikansi uji Glejser berada di atas 0,05 (Ghozali, 2021).

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi dalam memperlihatkan arah pengaruh dan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2021). Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Semarang dengan alat analisis statistika yang didukung dengan software SPSS.

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan yaitu:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kualitas Laporan Keuangan
β_1	= Koefisien regresi untuk Penerapan standar akuntansi pemerintah
β_2	= Koefisien regresi untuk Pemanfaatan teknologi informasi
β_3	= Koefisien regresi untuk Sistem Pengendalian Internal
β_4	= Koefisien regresi untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
X1	= Penerapan standar akuntansi pemerintah
X2	= Pemanfaatan teknologi informasi
X3	= Sistem Pengendalian Internal
X4	= Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
e	= <i>error terms</i>

3.6.5 Uji Goodness of Fit (Uji Kelayakan Model)

Uji ini berfungsi dalam menentukan seberapa baik penggunaan model yang sesuai saat pengujian hipotesis (Ghozali, 2021). Uji kelayakan model dapat menggunakan bentuk-bentuk pengujian berikut:

3.6.5.1 Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini berfungsi dalam melihat secara bersama-sama pengaruh dari variabel independen atas dependennya. Kriteria uji F yaitu bila signifikansi F di bawah 0,05 maka secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependennya (Ghozali, 2021).

3.6.5.2 Uji Koefisiensi Determinasi (R Square)

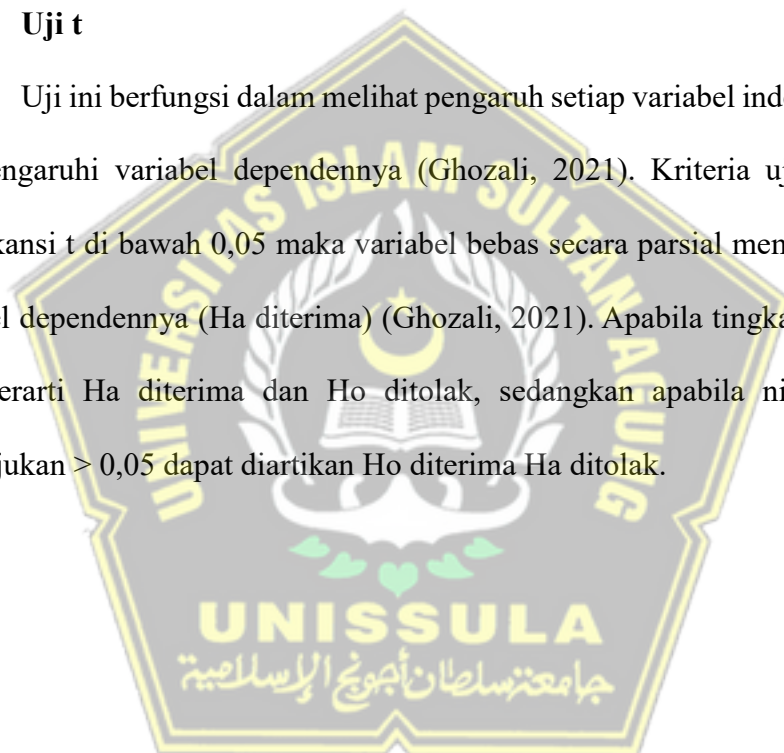
Uji ini berfungsi dalam melihat kemampuan model dalam untuk menjelaskan variabilitas dependennya. Nilainya berkisar antara nol hingga satu. Bila dihasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil artinya semua variabel independen yang digunakan mempunyai keterbatasan untuk menjelaskan variabel

dependennya. Sedangkan dihasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang hampir bernilai 1 artinya semua variabel independen yang digunakan mempunyai keterkaitan informasi yang sangat erat dalam menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2021).

3.6.6 Uji Hipotesis

3.6.6.1 Uji t

Uji ini berfungsi dalam melihat pengaruh setiap variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependennya (Ghozali, 2021). Kriteria uji t yaitu bila signifikansi t di bawah 0,05 maka variabel bebas secara parsial mempengaruhi 43 variabel dependennya (H_a diterima) (Ghozali, 2021). Apabila tingkat signifikan $< 0,05$ berarti H_a diterima dan H_o ditolak, sedangkan apabila nilai signifikan menunjukkan $> 0,05$ dapat diartikan H_o diterima H_a ditolak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Semarang. Sebanyak 102 kuesioner didistribusikan ke 34 SKPD yang ada di Kabupaten Semarang. Namun demikian tidak semua kuesioner dapat kembali dan memiliki jawaban yang lengkap karena alasan kesibukan kerja yang sedang dilakukan. Berikut adalah perincian tingkat distribusi dan pengembalian kuesioner:

Tabel 4.1
Deskripsi Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan (3x34 SKPD)	102
Kuesioner yang tidak kembali	(33)
Kuesioner tidak terisi lengkap	(1)
Kuesioner yang layak digunakan	68
<i>Respon rate</i>	66,67%

Sumber: Penyebaran dan pengembalian kuesioner

Berdasarkan tabel 4.1, sebanyak 68 kuesioner atau dengan *respon rate* 66,67% dari total kuesioner dapat kembali dan dengan jawaban yang lengkap. Dengan demikian kuesioner yang diolah adalah sebanyak 68 kuesioner.

4.2 Deskripsi Identitas Responden

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hasil penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai deskripsi identitas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Semua informasi mengenai hasil penelitian dan informasi responden tersebut diperoleh dari hasil distribusi kuesioner yang diperoleh kembali. Distribusi hasil penelitian ini disajikan berikut ini:

Tabel 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase (%)
Dibawah 30 th	10	14,71
31-40 th	25	36,76
41-50 th	19	27,94
Diatas 50 th	14	20,59
Jumlah	68	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.2, sebagian besar responden berumur 31–40 tahun yaitu sebanyak 25 responden atau 36,76% dan diikuti dengan kelompok umur 41–50 tahun yaitu sebanyak 19 responden atau 27,94%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau rata-rata responden yang bekerja di SKPD Kabupaten Semarang termasuk usia produktif.

Tabel 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama kerja	Jumlah	Persentase (%)
2-3 tahun	11	16,18
4-5 tahun	15	22,06
Diatas 5 tahun	42	61,76
Jumlah	68	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3, sebagian besar pekerja pada SKPD Kabupaten Semarang paling banyak memiliki lama kerja lebih dari 5 tahun yaitu terdapat 42 responden atau 61,76%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau rata-rata responden yang bekerja di SKPD Kabupaten Semarang sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama.

Tabel 4.4
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA	7	10,29
Diploma	19	27,94
S1	28	41,18
S2	14	20,59
Lainnya	-	-
Jumlah	68	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.4, bahwasannya sebagian pekerja pada SKPD paling banyak menempuh sarjana (S1) yaitu terdapat 28 responden atau 41,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja di instansi pemerintah daerah adalah pekerja profesional yang berpendidikan tinggi.

Tabel 4.5
Identitas Responden Berdasarkan Responden

Jabatan Responden	Jumlah	Persentase (%)
Pengelola Bagian Akuntansi	63	92,65
Lainnya	5	7,35
Jumlah	68	100,00

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.5, memperlihatkan bahwa pekerja bagian akuntansi lebih banyak proporsi sampel yang bekerja di SKPD Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 63 responden atau 92,65% dan sebanyak 5 responden atau 7,35% pada bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian SKPD di Kabupaten Semarang sangat profesional dalam membagikan posisi tempat kerja pegawai sesuai keahlian.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian adalah keterangan guna mengetahui tanggapan responden SKPD Kabupaten Semarang terhadap Variabel Dependen (Y) = Kualitas Laporan Keuangan, dan Variabel Independen (X) = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4). Tanggapan tersebut dapat di kategorikan dalam skala nilai terendah hingga tertinggi yang tercantum di dalam skala Likert poin 1-5. Adapun rentang skala responden menurut (Ghozali, 2021) dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$RS = (m - n) : k$$

$$RS = (5 - 1) : 3$$

$$RS = 4 : 3 = 1,33$$

RS = Rentang Skala

m = Nilai Maksimal

n = Nilai Minimal

k = Jumlah Kategori

Rentang skala indeks terbagi menjadi 3 bagian dengan nilai rentang skala sebesar 1,33 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks yaitu:

1. Kategori rendah atau kurang = nilai indikator 1 – 2,33
2. Kategori sedang atau cukup = nilai indikator 2,34 – 3,67
3. Kategori tinggi atau sangat baik = nilai indikator 3,68 – 5

Maka dapat disimpulkan berdasarkan pengelompokan kategori diatas, peneliti dapat menentukan setiap tanggapan responden terhadap variabel penelitian.

4.3.1 Deskripsi Tanggapan Responden

Skor dari jawaban responden SKPD Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan dan variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dikemukakan dalam bentuk tabel - tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Penerapan SAP

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata - Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Pencatatan asset telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan	0	0	0	41	27	68	4,40	Tinggi
2	Pencatatan utang telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan	0	0	6	38	24	68	4,26	Tinggi
3	Modal telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan	0	0	7	33	28	68	4,31	Tinggi
4	Laporan realisasi anggaran telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan	0	0	4	35	29	68	4,37	Tinggi

5	Pengelolaan keuangan telah ada pemisahan tugas fungsi dan tanggungjawab	0	0	9	32	27	68	4,26	Tinggi
6	Pengelola keuangan telah memahami penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	0	0	7	33	28	68	4,31	Tinggi
7	Pengelola keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi	2	2	16	30	18	68	3,88	Tinggi
8	Sarana/prasarana didalam pengelolaan keuangan yang dimiliki telah memadai	0	5	9	38	16	68	3,96	Tinggi
9	Informasi disajikan dengan jujur dan dengan terbuka (tidak ada yang di tutupi)	0	0	2	30	36	68	4,50	Tinggi
10	Anggaran penerimaan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pengeluaran	1	1	31	24	11	68	3,63	Sedang

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6, menjelaskan hasil interprestasinya adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) terdapat 10 (sepuluh) pernyataan yang telah diberikan kepada responden dan hasil skor rata-rata yang didapatkan untuk variabel ini adalah angka 4 dan 5 dengan keterangan “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variasi jawaban yang diberikan oleh para responden mengenai pernyataan yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah.

Tabel 4.7
Tanggapan Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata - Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer dalam melaksanakan tugas	0	0	5	25	38	68	4,49	Tinggi
2	Sistem pengolahan data telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan	0	0	0	28	40	68	4,59	Tinggi
3	Proses akuntansi dilakukan secara terkomputerisasi	0	0	0	33	35	68	4,51	Tinggi
4	Akses pekerjaan menggunakan teknologi (komputer) dapat menghemat waktu	0	1	3	28	36	68	4,46	Tinggi
5	Output yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi lebih terjamin keamanannya	0	0	11	30	27	68	4,24	Tinggi
6	Output yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi lebih terjamin keakuratannya	0	0	2	35	31	68	4,43	Tinggi
7	Jaringan internet di SKPD selalu dalam kondisi yang baik/ lancar	1	5	18	28	16	68	3,78	Tinggi
8	Sebagai pengelola keuangan/akuntansi saya memanfaatkan jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan	0	0	2	37	29	68	4,40	Tinggi

9	Saya mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas yang menggunakan teknologi	0	1	10	39	18	68	4,09	Tinggi
10	Saya menguasai software pengolahan data keuangan/akuntansi exel, MYOB, dan sebagainya	0	3	11	23	31	68	4,21	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.7, menjelaskan hasil interprestasinya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terdapat 10 (sepuluh) pernyataan yang telah diberikan kepada responden dan hasil skor rata-rata yang didapatkan untuk variabel ini adalah angka 4 dan 5 dengan keterangan “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variasi jawaban yang diberikan oleh para responden mengenai pernyataan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 4.8
Tanggapan Sistem Pengendalian Intern

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata - Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Pimpinan SKPD memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti SOP	0	0	1	37	30	68	4,43	Tinggi
2	SKPD telah menerapkan Standar Operating Prosedure (SOP) secara tertulis	0	0	2	42	24	68	4,32	Tinggi
3	Struktur organisasi SKPD telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pegawai SKPD	0	0	10	34	24	68	4,21	Tinggi

4	Pimpinan melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi	0	0	10	27	31	68	4,31	Tinggi
5	Pimpinan memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi	0	1	12	37	18	68	4,06	Tinggi
6	Setiap transaksi dan aktivitas yang di entri ke komputer sudah melalui tahap otorisasi dari pihak yang berwenang	0	0	0	31	37	68	4,54	Tinggi
7	SKPD telah menerapkan pemisahan fungsi tugas yang memadai	0	0	8	31	29	68	4,31	Tinggi
8	Pengeluaran uang pada SKPD telah didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak	0	0	2	33	33	68	4,46	Tinggi
9	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya	0	2	6	33	27	68	4,25	Tinggi
10	SKPD telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit	0	0	2	36	30	68	4,41	Tinggi
11	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi	0	2	10	27	29	68	4,22	Tinggi
12	SKPD selalu menindak lanjuti setiap hasil temuan dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat	0	0	4	27	37	68	4,49	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.8, menjelaskan hasil interpretasinya adalah Sistem Pengendalian Intern (X3) terdapat 12 (dua belas) pernyataan yang telah diberikan kepada responden dan hasil skor rata-rata yang didapatkan untuk variabel ini adalah

angka 4 dan 5 dengan keterangan “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variasi jawaban yang diberikan oleh para responden mengenai pernyataan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern.

Tabel 4.9
Tanggapan SAKD

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata - Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Setiap transaksi keuangan didukung dengan bukti transaksi	0	0	0	26	42	68	4,62	Tinggi
2	Pencatatan laporan keuangan dilakukan oleh staf khusus bagian keuangan	0	0	1	33	34	68	4,49	Tinggi
3	Setiap transaksi keuangan dilakukan dengan analisis transaksi	0	0	3	34	31	68	4,41	Tinggi
4	Laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik	0	0	1	29	38	68	4,54	Tinggi
5	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi	0	0	1	32	35	68	4,5	Tinggi
6	SKPD melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi	0	0	4	37	27	68	4,34	Tinggi
7	SKPD melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi	0	0	3	35	30	68	4,40	Tinggi
8	SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi dengan pos-pos yang sesuai	0	0	1	38	29	68	4,41	Tinggi
9	SKPD melaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan	0	0	2	38	28	68	4,38	Tinggi
10	Sistem akuntansi yang diterapkan pada SKPD sesuai dengan SAP	0	0	0	44	24	68	4,35	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.9, menjelaskan hasil interprestasinya adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4) terdapat 10 (sepuluh) pernyataan yang telah

diberikan kepada responden dan hasil skor rata-rata yang didapatkan untuk variabel ini adalah angka 4 dan 5 dengan keterangan “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variasi jawaban yang diberikan oleh para responden mengenai pernyataan yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah.

Tabel 4.10
Tanggapan Kualitas Laporan Keuangan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata - Rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Laporan keuangan yang disusun SKPD dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu	0	0	7	43	18	68	4,16	Tinggi
2	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan)	0	0	1	32	35	68	4,5	Tinggi
3	SKPD telah mampu menyelesaikan laporan keuangan (LRA, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan) tepat waktu	0	1	1	39	27	68	4,35	Tinggi
4	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan	0	0	3	36	29	68	4,38	Tinggi

5	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu	0	0	4	40	24	68	4,29	Tinggi
6	Apabila informasi dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh	0	0	7	43	18	68	4,16	Tinggi
7	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	0	0	2	50	16	68	4,21	Tinggi
8	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya	0	1	4	40	23	68	4,25	Tinggi
9	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material	0	2	3	46	17	68	4,15	Tinggi
10	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD belum memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah	3	13	19	27	6	68	3,29	Sedang

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.10, menjelaskan hasil interpretasinya adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y) terdapat 10 (sepuluh) pernyataan yang telah diberikan kepada responden dan hasil skor rata-rata yang didapatkan untuk variabel ini adalah angka 4 dan 5 dengan keterangan “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat beberapa variasi jawaban yang diberikan oleh para responden mengenai pernyataan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.4.1.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antara setiap nilai indikator dengan jumlah nilai konstruk. Pertanyaan dikatakan valid jika hubungan antara setiap indikatornya menunjukkan angka yang signifikan dimana r hitung $>$ t tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas

No	Variabel/Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah			
	X1.1	0,736	0,201	Valid
	X1.2	0,681	0,201	Valid
	X1.3	0,632	0,201	Valid
	X1.4	0,399	0,201	Valid
	X1.5	0,653	0,201	Valid
	X1.6	0,680	0,201	Valid
	X1.7	0,702	0,201	Valid
	X1.8	0,534	0,201	Valid
	X1.9	0,647	0,201	Valid
X1.10	0,660	0,201	Valid	
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi			
	X2.1	0,409	0,201	Valid
	X2.2	0,352	0,201	Valid
	X2.3	0,633	0,201	Valid
X2.4	0,675	0,201	Valid	

	X2.5	0,751	0,201	Valid
	X2.6	0,547	0,201	Valid
	X2.7	0,530	0,201	Valid
	X2.8	0,693	0,201	Valid
	X2.9	0,616	0,201	Valid
	X2.10	0,668	0,201	Valid
3	Sistem Pengendalian Intern			
	X3.1	0,666	0,201	Valid
	X3.2	0,603	0,201	Valid
	X3.3	0,620	0,201	Valid
	X3.4	0,706	0,201	Valid
	X3.5	0,736	0,201	Valid
	X3.6	0,675	0,201	Valid
	X3.7	0,742	0,201	Valid
	X3.8	0,496	0,201	Valid
	X3.9	0,663	0,201	Valid
	X3.10	0,540	0,201	Valid
	X3.11	0,570	0,201	Valid
	X3.12	0,509	0,201	Valid
4	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah			
	X4.1	0,498	0,201	Valid
	X4.2	0,656	0,201	Valid
	X4.3	0,715	0,201	Valid
	X4.4	0,676	0,201	Valid
	X4.5	0,677	0,201	Valid
	X4.6	0,676	0,201	Valid
	X4.7	0,728	0,201	Valid
	X4.8	0,667	0,201	Valid
	X4.9	0,694	0,201	Valid
	X4.10	0,514	0,201	Valid
5	Kualitas Laporan Keuangan			
	Y.1	0,569	0,201	Valid
	Y.2	0,661	0,201	Valid
	Y.3	0,439	0,201	Valid
	Y.4	0,629	0,201	Valid
	Y.5	0,531	0,201	Valid
	Y.6	0,577	0,201	Valid
	Y.7	0,505	0,201	Valid
	Y.8	0,598	0,201	Valid

Y.9	0,645	0,201	Valid
Y.10	0,346	0,201	Valid

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan data yang disajikan oleh tabel 4.11 tersebut menandakan hasil menguji kevaliditasan dari variabel independen: penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah dan variabel independen: kualitas laporan keuangan. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Variabel Penerapan SAP mencakup 10 item pertanyaan serta seluruhnya dikatakan valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel (r_{table} untuk $n = 68$ yaitu 0,201) melalui penggunaan 68 sampel respondennya.
- b. Variabel Pemanfaatan TI mencakup 10 item pertanyaan serta seluruhnya dikatakan valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel (r_{table} untuk $n = 68$ yaitu 0,201) melalui penggunaan 68 sampel respondennya.
- c. Variabel Sistem Pengendalian Intern mencakup 12 item pertanyaan serta seluruhnya dikatakan valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel (r_{table} untuk $n = 68$ yaitu 0,201) melalui penggunaan 68 sampel respondennya.
- d. Variabel SAKD mencakup 10 item pertanyaan serta seluruhnya dikatakan valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel (r_{table} untuk $n = 68$ yaitu 0,201) melalui penggunaan 68 sampel respondennya.
- e. Variabel Kualitas Laporan Keuangan mencakup 10 item pertanyaan serta seluruhnya dikatakan valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel (r_{table} untuk $n = 68$ yaitu 0,201) melalui penggunaan 68 sampel respondennya.

4.4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan pada item pertanyaan yang mempunyai pertanyaan valid, uji berikut mempergunakan teknik *Cronbach Alpha (a)* dengan SPSS. *Cronbach Alpha* menjabarkan hubungan diantara skala yang diciptakan dengan seluruh variabel skalanya yang tersedia. Manakala skor koefisien alpha > 0,60, berarti bisa dimaknai yaitu instrumen riset andal. Berikut adalah hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel 4.12:

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croncoach Alpha	Keterangan
Penerapan SAP	0,824	Reliabel
Pemanfaatan TI	0,781	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,857	Reliabel
SAKD	0,850	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,705	Reliabel

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.12 bisa diamati dalam variabel penerapan SAP memiliki a hitung $0,824 > 0,6$, variabel pemanfaatan TI mempunyai a hitung $0,781 > 0,6$, variabel SPI mempunyai a hitung $0,857 > 0,6$, variabel SKD mempunyai a hitung $0,850 > 0,6$, variabel kualitas laporan keuangan mempunyai a hitung $0,705 > 0,6$. Sehingga bisa berkesimpulan yakni semua variabel memiliki data yang reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan.

4.4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi terdistribusi normal. Pada riset tersebut, pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*.

Kriteria menguji mempergunakan menganalisis grafik normal *probability plot* yakni data disebut terdistribusikan dengan normal apabila titiknya tersebar di kisaran garis diagonal serta ikut pada arah garis diagonalnya. Kebalikannya, data disebut tidak berdistribusikan normal bila titiknya tersebar dari garis ataupun tidak ikut diagonal. Dalam menguji statistik *kolmogorov smirnov*, data disebut berdistribusikan normal bila nilainya sig melebihi 0,05. Di bawah ini hasil menguji normalitas menganalisis grafik normal *probability plot* ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,52922775
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,041
	Negative	-,058
Test Statistic		,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.13, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 sehingga dapat diartikan bahwa hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov* bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data residual pada model regresi terdistribusi normal.

4.4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas pada suatu model. Regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan SAP	,821	1,218
Pemanfaatan TI	,595	1,680
Sistem Pengendalian Intern	,551	1,815
SAKD	,612	1,634

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.14, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada model regresi penelitian ini.

4.4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan seluruh faktor gangguan terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah Uji Glejser dan Uji *Scatterplot*. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen, jika nilai signifikansi nya $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi nya $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	,571	2,610	,827
Penerapan SAP	-,049	,046	,291
Pemanfaatan TI	,086	,059	,149
Sistem Pengendalian Intern	-,021	,050	,679
SAKD	,020	,065	,762

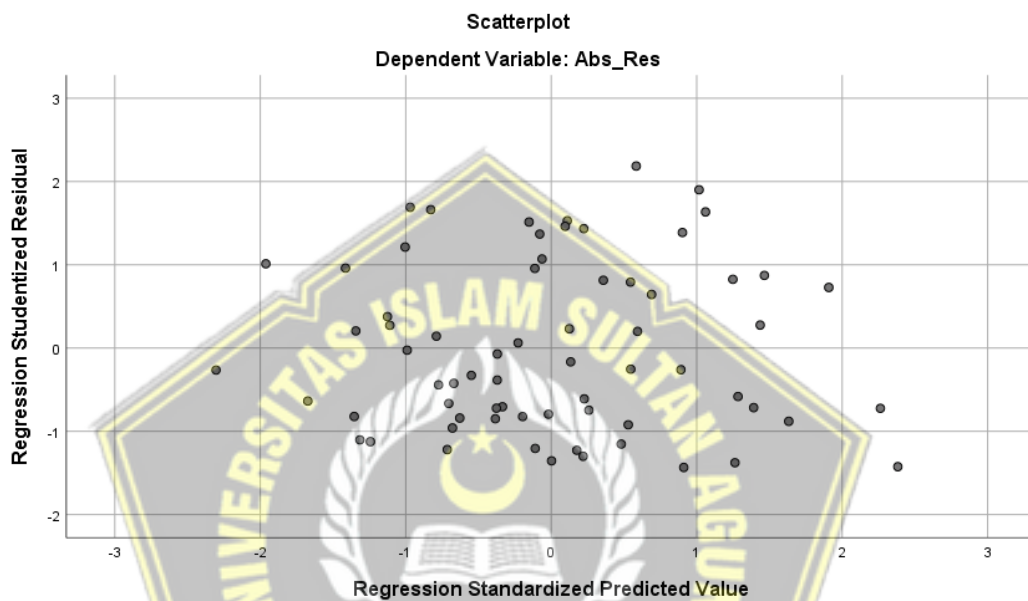
Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dalam setiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini melebihi 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Pada grafik scatterplot apabila tidak terjadi heteroskedastisitas akan menunjukkan pola yang tidak beraturan, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sebaliknya jika terjadi heteroskedastisitas grafik

scatterplot menunjukkan titik-titik yang berpola teratur seperti bergelombang atau menyempit. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji *Scatterplot*)



Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji scatterplot diatas, grafik menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tidak membentuk suatu pola, sehingga dapat dikatakan data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Supaya memahami pengaruhnya penerapan SAP, pemanfaatan TI, SPI dan SAKD kepada kualitas laporan keuangan Kabupaten Semarang bisa dilaksanakan melalui penggunaan uji menganalisis regresi linear berganda. Mengamati hasil

mengolah data yang mempergunakan bantuan spss didapatkan hasilnya dari menguji tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	14,951	4,646	3,218	,002
Penerapan SAP	,130	,081	1,595	,116
Pemanfaatan TI	-,213	,105	-2,027	,047
Sistem Pengendalian Intern	,283	,089	3,160	,002
SAKD	,357	,116	3,091	,003

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan yaitu:

$$Y = 14,951 + 0,130 X_1 + (0,213) X_2 + 0,283 X_3 + 0,357 X_4 + e$$

Persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat di interprestasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 14,951 dan nilai sig 0,002 ($< 0,05$) dapat diartikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dianggap tetap atau konstan maka Kualitas Laporan Keuangan semakin baik.
- b. Koefisien regresi pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai 0,130 yang bernilai positif dan memiliki nilai sig 0,116 ($> 0,05$). Artinya penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Koefisien regresi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai -0,213 yang bernilai negatif dan memiliki nilai sig 0,048 ($< 0,05$). Artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan

keuangan. Hal ini berlawanan dengan hipotesis 2 (pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang) dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- d. Koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai 0,283 yang bernilai positif dan memiliki nilai sig 0,002. Artinya sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan semakin baik.
- e. Koefisien regresi pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai 0,357 yang bernilai positif dan memiliki nilai sig 0,003. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

4.4.4 Hasil Uji Goodness of Fit (Uji Kelayakan Model)

4.4.4.1 Hasil Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F yaitu uji yang digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independent (bebas) dalam model regresi dapat berpengaruh secara simultan (Bersama-sama) pada variabel dependen (terikat). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dengan taraf nilai signifikansi sebesar 0,05. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	314,151	4	78,538	11,544	,000 ^b
Residual	428,599	63	6,803		
Total	742,750	67			

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.18, menunjukkan nilai Fhitung sebesar 11,544 dengan signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti semua variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah) secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan).

4.4.4.2 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Adapun hasil koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,650 ^a	,423	,386	2,60829

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Menurut hasil tabel 4.19 dapat diketahui nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,386 atau 38,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 38,6% sedangkan 61,4% dipengaruhi variabel lainnya.

4.4.5 Hasil Uji Hipotesis

4.4.5.1 Hasil Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik t dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansinya apakah diatas 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau sebaliknya. Adapun hasil uji t dapat dilihat dari tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20

Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Penerapan SAP	1,595	,116	Hipotesis ditolak
Pemanfaatan TI	-2,027	,047	Hipotesis ditolak
Sistem Pengendalian Intern	3,160	,002	Hipotesis diterima
SAKD	3,091	,003	Hipotesis diterima

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.20 diambil kesimpulan bahwa:

- a. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) memiliki nilai $t = 0,116 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,595 < t$ tabel 1.670. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 yang

berbunyi “penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang” **ditolak**.

- b. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) memiliki nilai $0,047 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,027 < t$ tabel 1.670. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis 2 yang berbunyi “pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang” **ditolak**.
- c. Variabel sistem pengendalian intern (X3) memiliki nilai $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,160 > t$ tabel 1.670. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesis 3 yang berbunyi “sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang” **diterima**.
- d. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X4) memiliki nilai $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,091 > t$ tabel 1.670. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesis 4 yang berbunyi “sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang” **diterima**.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang dilakukan, hasil penelitian memperlihatkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar $0,116 > 0,05$ dan t hitung $< t$ table $1,595 < 1,671$. Dengan ini, hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah menjamin laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Penerapan standar akuntansi pemerintah harus diawasi oleh lingkungan pengendalian sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Namun dalam penelitian ini tidak sejalan dengan hal tersebut dan teori agensi. Hal ini disebabkan karena jika anggaran penerimaan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pengeluaran, maka meskipun standar akuntansi diikuti dengan benar, laporan keuangan tetap akan mencerminkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah dkk (2020) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Rahmawati dkk (2018) dan Hasanah & Siregar (2021) dengan hasil penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang dilakukan, hasil penelitian memperlihatkan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar $0,047 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ table } -2,027 < 1,671$. Dengan ini, hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang signifikan tetapi kearah negatif.

Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Dengan tingginya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi, maka pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin tepat waktu dan hasilnya semakin baik, dalam pemanfaatan teknologi informasi individu atau pihak yang terlibat akan memahami tujuan atau target yang ingin dicapai oleh laporan keuangan tersebut, serta mengetahui bagaimana cara untuk mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, dan kemudian target-target laporan keuangan yang disusun akan sesuai dengan standar. Namun dalam penelitian ini tidak sejalan dengan hal tersebut dan teori agensi. Dikarenakan jaringan internet di SKPD yang tidak selalu dalam kondisi baik atau lancar dapat menyebabkan gangguan dalam proses pengolahan data, mengakibatkan keterlambatan atau ketidakakuratan dalam

penyajian laporan keuangan, serta meningkatkan risiko kesalahan atau kehilangan data yang mempengaruhi integritas laporan tersebut dan menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi bersifat negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aswandi (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Rahmawati dkk (2018) dengan hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang dilakukan, hasil penelitian memperlihatkan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar $0,002 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ table } 3,160 > 1,671$. Dengan ini, hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang signifikan kearah positif.

Sistem pengendalian Intern merupakan suatu sistem yang mampu mendeteksi adanya kecurangan dan penyimpangan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka implikasi sistem pengendalian intern yang efektif pada setiap instansi SKPD akan mempunyai

pengaruh baik dalam mengetahui dan mendeteksi suatu tindakan yang menyimpang serta dapat mengarahkan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan memiliki karakteristik kualitatif. Penerapan *Agency Theory* dalam hal ini berkaitan dengan sistem pengendalian intern bahwasanya pemerintah menyusun laporan keuangan memerlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam mendeteksi suatu penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga *output* dari laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan untuk tujuan dalam hal membuat keputusan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2018) dan Ismail dkk (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Mokoginta dkk (2017) dengan hasil sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.5.4 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang dilakukan, hasil penelitian memperlihatkan variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$ dan $t \text{ hitung} < t \text{ table } 3,091 > 1,671$. Dengan ini, hipotesis yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel

sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang signifikan kearah positif.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang karena melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, akan dihasilkan laporan keuangan yang cepat, akurat dan tepat waktu. Penerapan *Agency Theory* dalam hal ini berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah bahwasanya pemerintah daerah untuk mendapatkan laporan keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja, maka perlu adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang dirancang dan dibuat aturannya yang dapat mengintegrasikan laporan keuangan dan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mampu menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah secara keseluruhan sehingga tidak menyestakan bagi pengguna laporan keuangan untuk tujuan dalam hal membuat keputusan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta dkk (2017), Defitri (2018), dan Ismail dkk (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Semarang sudah memahami prosedur akuntansi sampai dengan menjadi laporan keuangan sehingga memungkinkan untuk memperoleh laporan keuangan yang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang.
3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang. Hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan semakin baik.
4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Semarang. Hal ini berarti semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak bisa memastikan bahwa yang menerima kuesioner saat disebarkan diterima oleh responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei dengan instrumen berupa kuesioner, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian dan juga adanya keterbatasan dalam penelitian, maka saran yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penambahan verifikasi kuesioner seperti bagan struktur organisasi bagian keuangan agar bisa memastikan siapa saja penerima kuesioner yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Bagi penelitian selanjutnya bisa menambahkan metode survei dengan melakukan pertanyaan terbuka kepada responden sehingga kesimpulan yang diambil tidak hanya berdasarkan data kuesioner.

5.4 Implikasi Penelitian

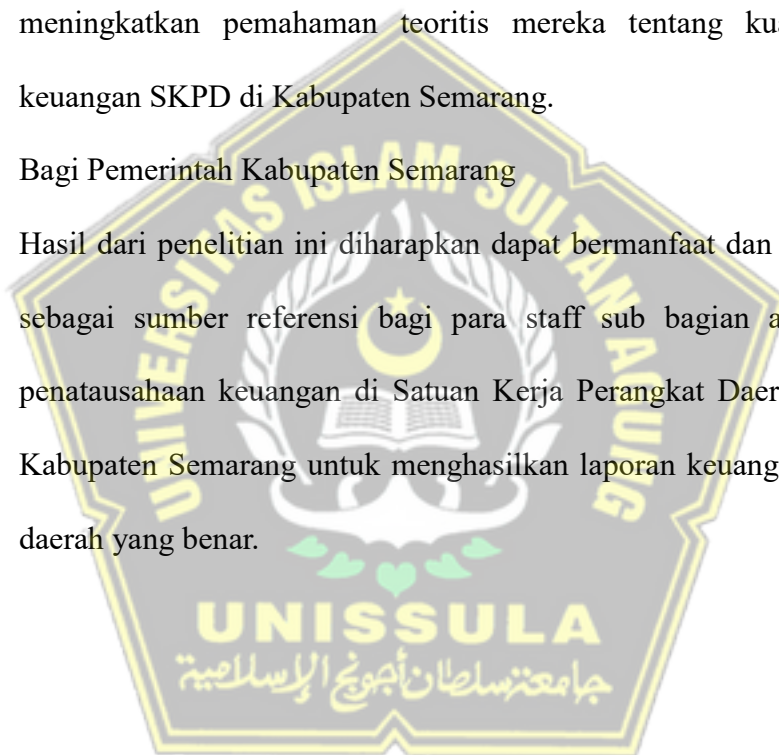
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat diambil dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi teoritis dan Praktisi

Akademisi dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memperluas pengetahuan, sudut pandang dan sumber informasi mereka, yang akan meningkatkan pemahaman teoritis mereka tentang kualitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Semarang.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai sumber referensi bagi para staff sub bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Semarang untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik dan Ekonomi*. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>
- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- Aswandi, W. (2018). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang).
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Fauziyah, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 196–209. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i2.6386>
- Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasanah, S., & Siregar, T. R. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–23. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90>
- Husna, maryam dan ikhbar. (2022). *Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar*.

4(2), 206–214.

Ismail, N., Marselina, A., & Loda, E. B. (2021). Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena: (1) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang tersebut oleh pemerintah dap. *Open Journal Systems*, 15(12), 5889–5896.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*.
<https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2019). *S a P 2019*. 262.

Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(2), 201.
<https://doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2443>

Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(1), 1–14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).

- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 3–28. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395>
- Safriani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm; Penerapan Sap Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Aceh. 3, 14–22. <http://repository.unmuha.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/1703>
- Sari, G. I., & Fadli, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 7(3), 17–34. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.17-34>
- Sugiyono.(2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>

